

# Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian

Oleh:

Siti Muchorrotun

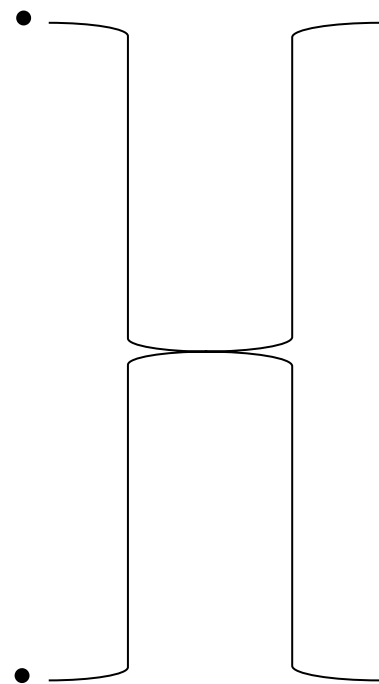
Isna Fitria Agustina

Progam Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Juli, 2025

# LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat

Ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang sangat penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilayani.



peran dapat diartikan sebagai konsep diri individu yang didasarkan pada perilaku dan posisi sosialnya di tengah masyarakat

tugas Satpol PP dalam penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

# LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah namun, berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan perilaku masyarakat yang sering kali menyepelekan dan mengabaikan tugas dari terbentuknya Satpol PP ini sehingga adanya resistensi dan bahkan perlawanan dari masyarakat terhadap petugas di lapangan tidak disangkal lagi, kehadiran Perda ketertiban umum di kota - kota justru semakin melegitimasi dan menjustifikasi masyarakat untuk melakukan pelanggaran dan juga didukung dengan banyaknya berita hoax yang bermunculan tentang tindakan yang melawan hukum oleh Satpol PP menyebabkan masyarakat semakin banyak yang melakukan pelanggaran.



Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Krian dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

# LATAR BELAKANG (DATA)

Berikut data peran Satpol PP Kecamatan Candi sebagai berikut :

**Tabel 1. Jenis Program Kegiatan Trantibun Satpol PP Kecamatan Krian**

No	Jenis Program
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat
2	Mediasi Penanganan Perselisihan Masyarakat
3	Pengamanan Kegiatan
4	Penanganan Penertiban PKL dan Bangunan Liar

Sumber : Pemerintah Kecamatan Krian

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa ada empat jenis program yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Krian dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun, ada beberapa permasalahan yang ada belum dapat terselesaikan oleh Satpol PP Kecamatan Krian salah satunya mengenai laporan warga yang terdampak polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sekam oleh pabrik serta ada beberapa bangunan liar yang belum dapat ditindak oleh Satpol PP Kecamatan Krian.

# GAP PERMASALAHAN

Berdasarkan dari hasil observasi dilapangan terdapat beberapa permasalahan yakni:

Laporan warga yang terdampak polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sekam oleh pabrik Belum dapat terselesaikan

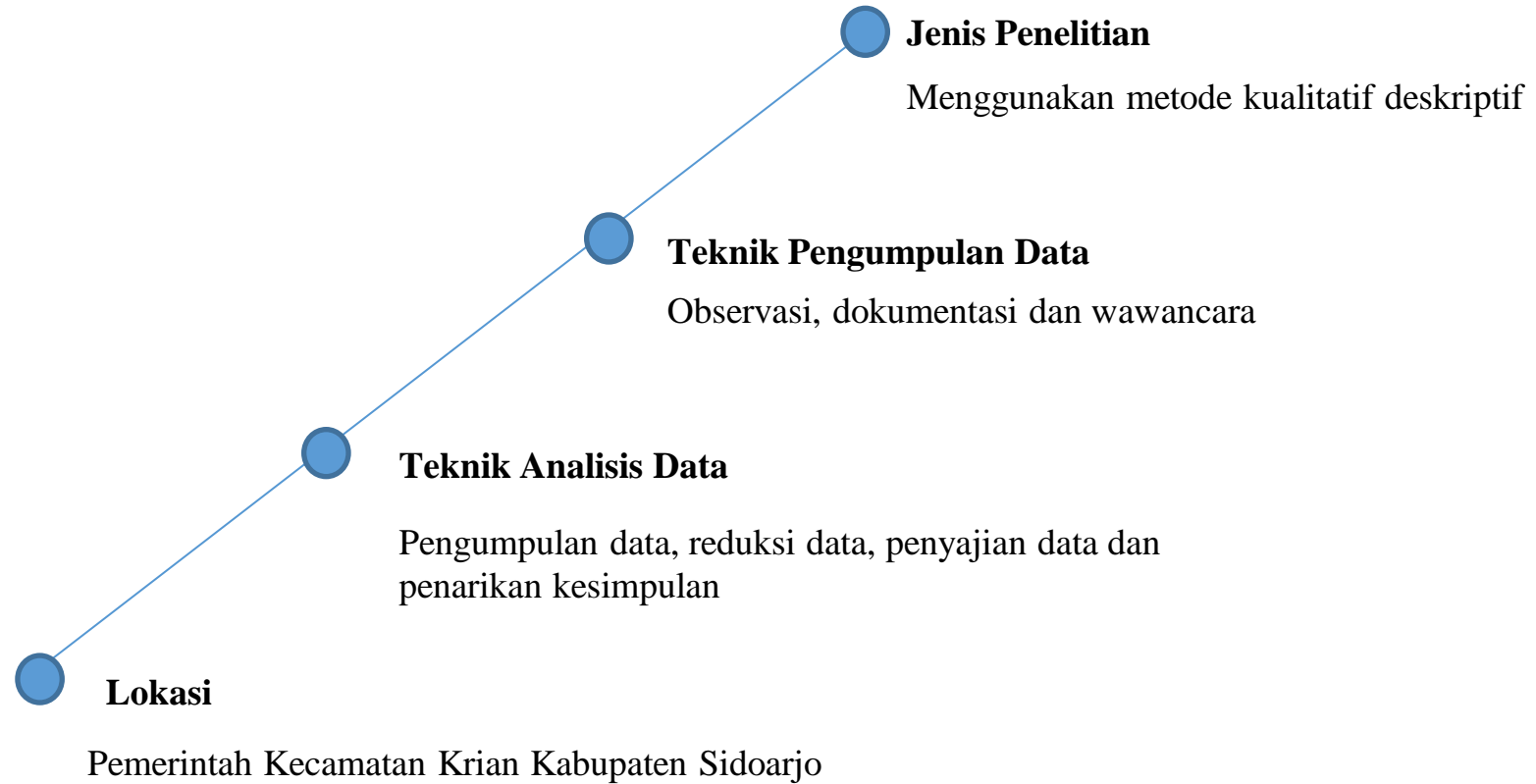
Bangunan liar yang belum dapat ditindak oleh Satpol PP Kecamatan Krian

Koordinasi Stakeholder yang kurang

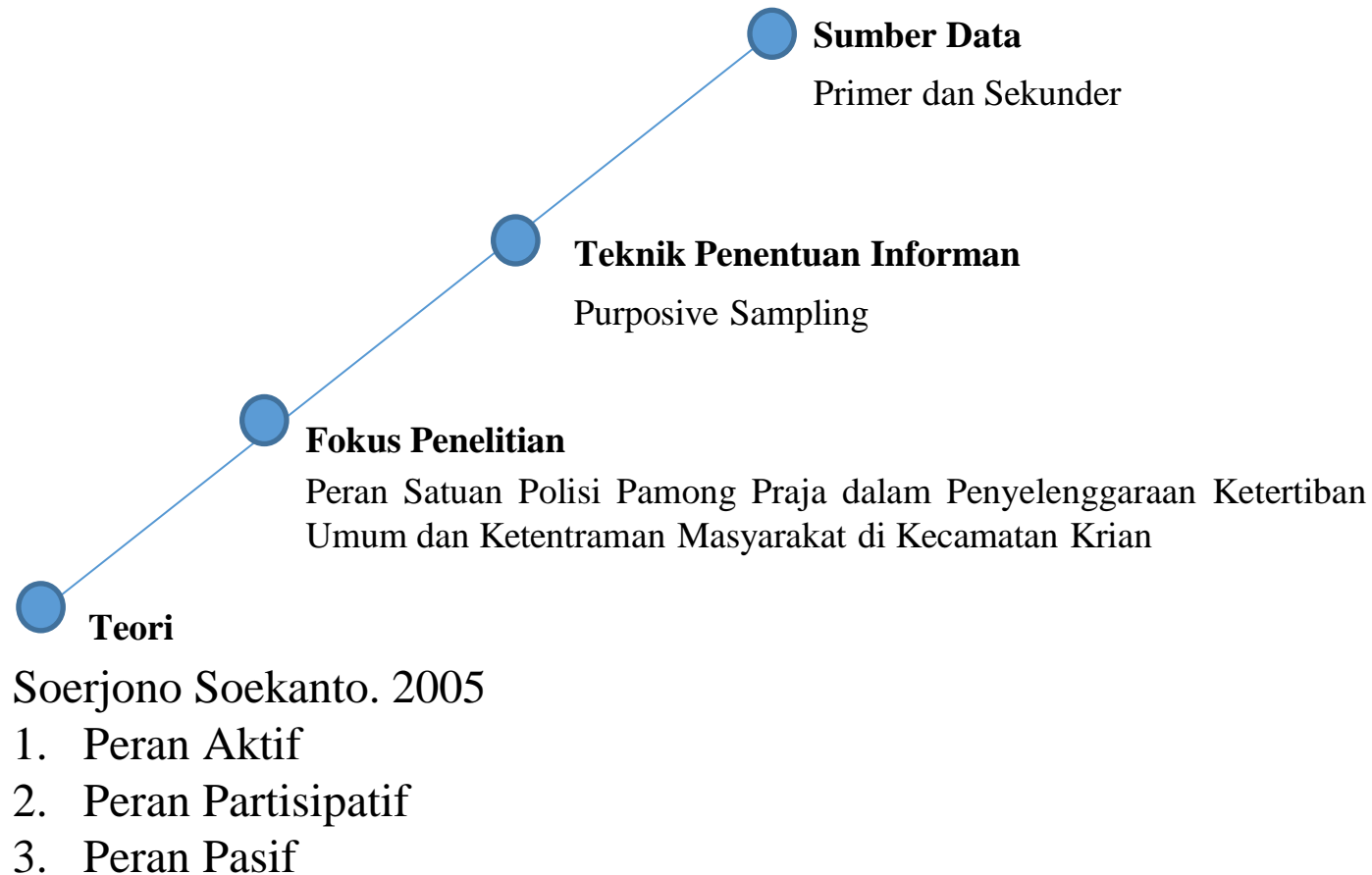
# PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA dan TAHUN	JUDUL	HASIL
1.	Muhammad Ilham Effendy (2020)	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Berau	Dari penelitian ditemukan bahwa peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Berau melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana, meskipun belum maksimal
2.	Widi Aulia Rakhman. (2016)	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik. Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
3.	Muidatin Ilmiah, (2023)	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya	Satpol PP Kota Surabaya sudah mulai melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan juga penegakan yurisdiksi dan non- yurisdiksi. Upaya lainnya adalah dengan membuat jadwal kerja yang cocok untuk organisasi dan mengadopsi sikap humanis terhadap warga Kota Surabaya

# Metode



# Metode



# Hasil dan Pembahasan

## A. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah Kecamatan Krian belum dapat menyelesaikan permasalahan terkait pelaporan warga mengenai polusi udara. Peran pemerintah sebagai dinamisator pada mengenai Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat Kecamatan Krian telah memahami dan turut berpartisipasi dalam pengaduan gangguan ketertiban umum di lingkungan sekitar. Namun, masih kurangnya strategi dalam mengintegrasikan stakeholder terkait dalam permasalahan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian belum dapat berjalan dengan baik. Sehingga perlu adanya koordinasi yang dilakukan secara intens dan baik dengan stakeholder terkait agar dapat menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. hasil penelitian saat ini jika disandingkan dengan penelitian terdahulu berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau dijumpai hasil yang sama dimana kegiatan penyuluhan dan kooridinas telah dapat terlaksana meskipun belum berjalan secara maksimal

# Hasil dan Pembahasan

## B. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator dalam Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah efektif. Dimana Pemerintah Kecamatan Krian telah mengatur dan menerbitkan peraturan guna menjamin keseimbangan pembangunan serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mekanisme koordinasi dan komunikasi yang terstruktur, seperti Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang diadakan setiap tiga bulan sekali, menjadi wadah penting untuk pelaporan, diskusi, dan penyelesaian masalah terkait ketertiban. Komitmen ini dilengkapi dengan respons cepat terhadap laporan masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum, yang ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan dan penanganan langsung oleh Satpol PP serta pihak terkait lainnya, sebagaimana terbukti dari berbagai laporan dan penanganan kasus di tahun 2024, mulai dari penertiban banner hingga penanganan PMKS, ODGJ, lansia terlantar, dan kebakaran. Hasil di atas jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Surabaya dijumpai hasil yang sama dimana telah melakukan kegiatan pencegahan gangguan ketentaman masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan

# Hasil dan Pembahasan

## C. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator dalam Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah efektif dimana dapat dikatakan baik. dimana upaya proaktif mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Kecamatan Krian menghadirkan inovasi, meskipun belum menciptakan sistem baru secara mandiri, namun telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Laporan Ketertiban Masyarakat (SIMLITABMAS). Sistem ini, yang terhubung langsung dengan penegak hukum di Kabupaten Sidoarjo, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dan memastikan semua pemangku kepentingan terkait menerima informasi aduan secara otomatis. Sosialisasi SIMLITABMAS kepada Banpol PP, Polisi, TNI, Linmas, dan masyarakat juga telah dilakukan untuk menggalang partisipasi aktif, mengingat masyarakat merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman, sekaligus mempermudah proses pelaporan tanpa harus datang ke kantor. Hasil penelitian saat ini jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Surabaya dijumpai hasil yang berbeda dimana pada penelitian terdahulu belum melakukan sosialisasi terkait SIMLITABMAS

# Hasil dan Pembahasan

## D. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah baik. Secara konkret, Kecamatan Krian melakukan upaya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan menyelenggarakan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi siswa-siswa SMA/SMK. Kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya ketertiban dan ketenteraman. Selain itu, Kecamatan Krian juga aktif melakukan mediasi atas laporan gangguan ketertiban masyarakat, seperti kasus polusi udara akibat pembakaran sekam pabrik di area padat penduduk, dengan menjadi fasilitator untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang timbul. Hasil penelitian saat ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Berau dijumpai hasil yang sama.

# Kesimpulan

Berdasarkan indikator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian ditinjau menggunakan teori peran pemerintah menurut Arif dengan indikator peranan pemerintah meliputi Dinamisator, Regulator, Katalisator, serta Fasilitator dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, peran pemerintah sebagai Dinamisator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan baik. Kedua, peran pemerintah sebagai Regulator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah efektif. Ketiga, peran pemerintah sebagai Katalisator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah efektif. Keempat, peran pemerintah sebagai Fasilitator pada Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Krian dapat dikatakan telah efektif.

